

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrar Saleng. 2004. Hukum Pertambangan, Yogyakarta. UII Press.
- Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Cetakan ke-12 (revisi). Djambatan. Jakarta.
- Bryan A. Garner. 2004. Black's Law Dictionary. Eight Edition. A Thompson Business: West. St. Paul.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- HR. Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm.337.
- Irwansyah. 2022. Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Cet.5. Ed. Revisi. Yogyakarta. Mirra Buana Media. Hlm. 43.
- Muhammad Ilham Ari Saputra. 2015. Reforma Agraria Di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Parlindungan, A.P., 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Mandar Maju. Jakarta.
- Peter Butt. 1980. *Intoduction to Land Law. The Law Book Company Limited*. Second Edition. Sydney. dalam Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. Reforma Agraria Di Indoensia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta. Prenada Media Group. Hlm. 181.
- Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada),
- Sudargo Gautama, Ellyda T Soetijarto. 1997. Tafsir Undang-Undang Pokok Agraria. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Suriansyah Murhaini. 2018. Hukum Pertanahan : Alih Fungsi Tanah dan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah. Cetakan I. Yogyakarta. LaksBang Justitia Surabaya.

- Umar Said Sugiharto, Suratman, dkk. 2015. Hukum Pengadaan Tanah, Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi. Cetakan III. Malang. Setara Press.
- Urip Santoso. 2012. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta. Kencana Prenada Group.
- Waskito dan Hadi Arnowo. 2018. "Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang", Jakarta: Prenadamedia Group.

Karya Ilmiah

- Hariadi, U. dan Masruchah. 1995. Tanah Rakyat dan Demokrasi, Forum LSM-LPSM DIY, Yogyakarta. Hlm 104-105.
- Ir. Bambang Deliyanto, Pengenalan dan Manajemen Lahan Modul 1 Pembelajaran.LING1002/MODUL1.<https://repository.ut.ac.id/4348/1/LING1002-M1.pdf>
- Roganda Doli. 2021. "Tanggung jawab Hukum Pengembang (Developer) Perumahan Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kepemilikan Rumah". Tesis. Sekolah Ilmu Tinggi Hukum IBLAM.
- Ronald Z. Titahelu. 1993. Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat. Disertasi. Surabaya. PPS-UNAIR.

Jurnal

- Andi Dasril Dwi Darmawan, Achmad Ruslan, Musakkir, 2021, POLITIK HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM INDONESIA, HERMENEUTIKA VOL. 5, NO. 2, hal. 277. (<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/5696>)
- Askam Tuasikal, "Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan

Kota di Provinsi Maluku),” Jurnal Keuangan dan Perbankan, 10, 1 (2017), hlm. 3. Lihat Dalam Hasyim Sofyan Lahilote, Irwansyah, DKK, 2021, Pengawasan terhadap Bank Tanah: Urgensi, Kewenangan, dan Mekanisme, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1, hlm. ----
<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/246/54>

Eko, T., & Rahayu, S. (2012). Perubahan penggunaan lahan dan kesesuaiannya terhadap RDTR di wilayah Peri-Urban studi kasus: Kecamatan Mlati. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 8(4), 330-340.

Eridani Tri Lestari, Syahrudin Nawi, dkk, 2024, Efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar, Journal of Lex Theory (JLT), Vol.5, No. 2, PASCA Universitas Muslim Indonesia, Makassar, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/download/1779/2071/7912>,

Mimi Arifin, et.al. 2021. “Konsep Penanganan Bencana Banjir pada Perumahan Perumnas Manggala Kota Makassar”. Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat). Vol. 4. No. 2.

Muhammad Farid Usman, Wiwik Wahidah Osman, dkk. 2023. Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman pada Kawasan Resapan Air di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Jurnal Wilayah dan Kota Maritim Vol. - No. -. Makassar.

Setyo Ardy Gunawan, Yudo Prasetyo, Fauzi Janu Amarrohman, 2016, Studi Penentuan Kawasan Resapan Air Pada Wilayah DAS Banjir Kanal Timur, Jurnal Geodesi Undip, Volume 5, Nomor 2, Universitas Diponegoro.

Siti Nur Faida Said, Irwansyah, 2019, Land Acquisition by the Government and the Impact for the Community, Papua Law Journal. Volume

3 Issue 2, (<https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/788/pdf>)

Soehartono, “Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara”, *Yustisia*, 1, 2 (2012), hlm. 184. Lihat Dalam Hasyim Sofyan Lahilote, Irwansyah, DKK, 2021, Pengawasan terhadap Bank Tanah: Urgensi, Kewenangan, dan Mekanisme, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1, hlm. ----
<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/246/54>

Zulkifli Aspan, 2022, Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, *Amanna Gappa*, Vol. 30 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 155. (<http://journalold.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/26413/9665>)

Website

Ashari Prawira Negara, SINDOnews.co, 2021, Tambah Ruang Terbuka Hijau, Tiga Tempat Pemakaman Ditanami Pohon, Diakses melalui
<https://daerah.sindonews.com/read/347394/711/tambah-ruang-terbuka-hijau-tiga-tempat-pemakaman-ditanami-pohon-1614304965>, pada 24 Maret 2025 pukul 14.05 WITA

Catatan Planner, 2022, Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,
<https://www.catatanplanner.com/2022/05/undang-undang-no-26-tahun-2007-tentang.html>, pada tanggal 14 Maret 2025 Pukul 15.00 WITA

Darwin bkm, Tim Redaksi UjungJari, 2025, Ketua DPRD Makassar Supratman Ingatkan Pengembang Perumahan Penuhi RTH 30 Persen, Diakses melalui

<https://www.ujungjari.com/2025/05/11/ketua-dprd-makassar-supratman-ingatkan-pengembang-perumahan-penuhi-rth-30-persen/>, pada 24 Maret 2025 pukul 13.00 WITA

Darwin bkm, Tim Redaksi UjungJari, Belajar dari JIS, Pemkot Makassar Siapkan Stadion Untia Berstandar Nasional, Diakses melalui <https://www.ujungjari.com/2026/02/04/belajar-dari-jis-pemkot-makassar-siapkan-stadion-untia-berstandar-nasional/>, pada 24 Maret 2025 pukul 14.00 WITA

Dinkominfo Demak. 2023. "11 Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan". Satu Data Demak. Diakses melalui https://satudata.demakkab.go.id/detail_sdgs?tujuan=11 pada 3 Oktober 2024 pukul 19.00 WITA.

DISKOMINFO Kota Makassar, 2023, Konsisten Tolak Jalur KA Model At Grade, Pemkot Makassar Usulkan Revisi Perda RT/RW, <https://diskominfo.makassarkota.go.id/konsisten-tolak-jalur-ka-model-at-grade-pemkot-makassar-usulkan-revisi-perda-rt-rw/>, diakses pada tanggal----

Kementerian Pekerjaan Umum, 2009, Pemerintah Bertekad Wujudkan RTH 30%, <https://pu.go.id/berita/pemerintah-bertekad-wujudkan-30-persen-rth>, diakses pada tanggal----

Newsurban, 2022, Dewan Dorong Pemkot Makassar Penuhi Syarat RTH 30 Persen, Diakses melalui <https://newsurban.id/2022/11/05/dewan-dorong-pemkot-makassar-penuhi-syarat-rth-30-persen/#:~:text=MAKASSAR%2C%20NEWSURBAN,30%20persen%20dari%20luasan%20kota>, pada 24 Maret 2025 pukul 13.15 WITA

Nurhidayat Said, Tim Redaksi Detik Sulsel, 2025, 79 Pengembang Perumahan di Makassar Dipantau KPK, Diakses melalui <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-8164324/79>

pengembang-perumahan-di-makassar-dipantau-kpk, pada 24 Maret 2025 pukul 13.10 WITA.

Riski Wijaya, JatimTimes, 2024, DPRD Kota Malang Sarankan Pemkot Beli Banyak Lahan untuk Penuhi RTH, Diakses melalui <https://www.malangtimes.com/baca/312154/20240515/105200/dprd-kota-malang-sarankan-pemkot-beli-banyak-lahan-untuk-penuhi-rth#:~:text=Untuk%20itu%20dalam%20hal%20ini,berangsur%20dapat%20memenuhi%2030%20persen>, pada 24 Maret 2025 pukul 15.00 WITA

Sekretariat Nasional SDGS. “11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan”. Kementerian PPN/Bappenas diakses melalui <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-11/> pada 9 Oktober 2024 pukul 19.10 WITA.

Tim HukumOnline. 2013. 7 Asas-Asas Hukum Agraria dalam UUPA. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-hukumagrarialt646201e7068e8?page=all> pada 15 September 2024 Pukul 15.00 WITA.

Tempo.co. 2023. Peneliti dari Unhas Ungkap Penyebab Banjir: Pemberian Izin Perumahan di Daerah Resapan Air. Diakses melalui <https://www.tempo.co/sains/peneliti-dari-unhas-ungkap-penyebab-banjir-pemberian-izin-perumahan-di-daerah-resapan-air-232951> pada 15 september 2024 Pukul 15.00 WITA.

United Nation. 2022. “The Sustainable Development Agenda”. United Nations. diakses melalui <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/> pada 3 Oktober 2024 pukul 18.30 WITA.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kota Makassar lihat dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.